

Strategi Pembinaan Teritorial Tentara Indonesia Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Victor Andhyka Tjokro
victortjokro@gmail.com

Universitas Pertahanan

Abstrak. Ketahanan pangan merupakan upaya pertahanan Negara yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan berkembangnya ancaman yang mengancam kedaulatan dan ketergantungan Negara dengan Negara lain. Mengatasi dinamika ancaman nonmiliter TNI ditempatkan memiliki peran dalam mendukung program sejalan dengan pelaksanaan pembinaan teritorial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program ketahanan pangan, menganalisis strategi TNI melalui pembinaan teritorial dalam mewujudkan ketahanan pangan, dan hambatan dari strategi militer melalui pembinaan teritorial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ketahanan pangan terlaksana berdasarkan Visi Pemerintah Indonesia yang melibatkan TNI dalam mewujudkan program bersama dengan Kementerian Pertanian. Strategi yang digunakan melalui pembinaan teritorial menggabungkan kekuatan antar matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, dengan perencanaan pembangunan kompi produksi. Analisis strategi binter TNI dilakukan dengan *Ends-Ways-Means* yang menunjukkan kesesuaian antara tujuan, metode, dan sumber daya yang dimiliki TNI. Hambatan yang ditemukan terdiri dari faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan binter. Penelitian ini diperlukan peninjauan ulang pada sistem sinergitas antar lembaga dan juga tiap matra TNI agar pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berhasil dan berkelanjutan.

Kata kunci: strategi, pembinaan teritorial, pelaksanaan, hambatan, ketahanan pangan

Abstract. *Food security is a national defense effort that is one of the Indonesian government's priorities. This is in line with the growing threats to the country's sovereignty and dependence on other countries. To address the dynamics of non-military threats, the Indonesian National Armed Forces (TNI) plays a role in supporting programs in line with the implementation of territorial development. This study aims to analyze the implementation of food security programs, analyze the TNI's strategy through territorial development in realizing food security, and identify obstacles to military strategy through territorial development. The research method used was descriptive qualitative, through in-depth interviews and document studies. The results showed that the food security program was implemented based on the Indonesian Government's vision, which involved the Indonesian National Armed Forces in realizing the program together with the Ministry of Agriculture. The strategy used through territorial development combines the strengths of the Army, Navy, and Air Force, with plans to develop production companies. Analysis of the TNI's territorial strategy is carried out using the Ends-Ways-Means approach, which demonstrates the compatibility between the TNI's objectives, methods, and resources. The obstacles encountered consist of internal and external factors in the implementation of binter. This research requires a review of the synergy system between institutions and also each branch of the TNI so that the implementation of the food security program can be successful and sustainable.*

Keywords: *strategy, territorial development, implementation, obstacles, food security.*

1. Pendahuluan

Menurut *The Global Food Security Index*, ketahanan pangan Indonesia menempati posisi-10 di Asia dan Pasifik serta 60 di dunia. Ancaman krisis pangan global dan tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan dari negara luar, menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat riskan untuk mengalami kenaikan harga bahan pangan serta memiliki tingkat rentanitas terhadap ketahanan pangan. Sesuai dengan pemerintahan baru, dengan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut *Asta Cita*. Pada poin nomor dua yaitu

memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam upaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu fokus utama dalam Asta Cita adalah ketahanan pangan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga telah merumuskan berbagai program untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa program utama ketahanan pangan di Indonesia. Program ketahanan pangan di Indonesia dirancang untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, TNI, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan nasional yang kokoh.

Dalam rangka mendukung Asta Cita, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengimplementasikan berbagai program ketahanan pangan. Asta Cita menjadi dasar bagi pemerintah dan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI, dalam mewujudkan kemandirian nasional dan daya tahan bangsa di berbagai sektor. TNI berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. TNI berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. TNI dalam menjalankan tugas dan bagian dari representasi pertahanan Negara dapat terlaksana sebagai sistem yang diharapkan terutama dalam program ketahanan pangan, Untuk menunjukkan dan mewujudkan hal tersebut maka TNI memang memiliki urgensi penuh dalam tugas tersebut. Terandung didalam tugas pokok TNI sebagaimana tercantum dalam perubahan pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 pasal 7 ayat (1), tentang tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pada pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas pokok sebagaimana di sebutkan pada pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Tugas mendukung pemerintah dalam ketahanan pangan termasuk dalam OMSP. TNI melalui tiap-tiap Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) diberikan tugas yang salah satunya adalah perbantuan terhadap pemerintah daerah. Tugas tersebut dilakukan melalui Pembinaan Teritorial (Binter), yakni upaya pengelolaan pertahanan di daerah dengan pendekatan atau metode pembinaan dari aspek komunikasi sosial, ketahanan wilayah, dan bakti TNI. Dikarenakan situasi dan potensi yang dimiliki oleh personel TNI sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari pembinaan yang mengelola dan menjadi pendamping dalam program-program pemerintah melalui Sterad, Steral, dan Sterau. Binter menjadi fungsi yang berjalan membantu petani karena mereka mendapatkan pengajaran yang sistematis untuk mengolah pertanian, dari perencanaan hingga evaluasi hasil, dan menjadi bentuk sinergitas dengan Kementerian Pertanian.

Namun, penggabungan tiap matra dalam mendukung program ketahanan pangan masih berlanjut dengan kondisi kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih perlu dipenuhi terutama dukungan dari kementerian atau lembaga yang berwenang sebagai bentuk implementasi dari strategi penggunaan kekuatan TNI dengan potensi yang dimiliki tiap matra, perlu dianalisis bagaimana pelaksanaannya dalam program ketahanan pangan nasional. Terutama masih terkendalanya sarana dan prasarana yang akan digunakan TNI dalam melaksanakan tugas tersebut, meskipun melalui potensi yang dimiliki TNI tiap matra dalam pembinaan juga masih didapati kekurangan, akan tetapi berdasarkan penjelasan fenomena diatas, dikatakan program ketahanan pangan Indonesia sudah berjalan dan terus memperlihatkan hasil sebagai wujud implementasi.

Berdasarkan fenomena dengan kajian diatas terkait strategi Binter TNI pada program ketahanan pangan sesuai dengan program misi pemerintah yaitu Asta Cita dan untuk menjaga kedaulatan Negara dari ancaman kekurangan dan ketergantungan pangan sebagai spektrum ancaman non-militer. Dapat disimpulkan sementara, bahwa perkembangan ancaman non-militer dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis menjadikan aspek pangan perlu dijaga untuk menjamin ketahanan dan keamanan pangan nasional, terutama menimbulkan ketergantungan dari Negara lain, menghadapi ancaman ini Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang relevan tidak mampu melaksanakan program sendiri, berdasarkan kemampuan yang dimiliki menjadikan adanya keterlibatan TNI sebagai suatu strategi untuk mendukung perwujudan program pemerintah tersebut. Sedangkan sebagai aspek idealitas bahwa Indonesia sebagai

Negara yang memiliki sumber daya yang besar masih ditemukan beberapa kendala terutama dari TNI kepada Kementerian Pertanian dalam program ketahanan pangan, terutama dalam dalam hal ini fasilitas pendukung kemampuan personel dan peralatan dalam pelaksanaan program.

2. Tinjauan Pustaka

Sistem pertahanan negara merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan. Kepentingan nasional tersebut akan terwujud melalui pembangunan nasional di segala bidang termasuk pembangunan bidang pertahanan. Sementara itu pembangunan bidang pertahanan perlu disiapkan sejak dini melalui pemberdayaan wilayah pertahanan.

Teori tentang kerjasama dapat dikaitkan dalam analisis penelitian karena dalam pelaksanaan pembinaan teritorial TNI dilakukan oleh tiap matra dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta terlaksananya kerjasama antar kementerian dan lembaga yang berwenang dalam program ketahanan pangan nasional. Menurut Charlie H. Cooley, kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama pada saat bersamaan, mempunyai cukup pengetahuan, dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan.

Dikaitkan dengan pembinaan, terdapat dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: pertama, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan. Kedua, pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Untuk pemahaman strategi, dijelaskan bahwa Menurut Yarger, strategi memberikan arahan untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang disebut pada dasarnya bersifat proaktif. Sedangkan, menurut (Arthur Lykke, Jr: 2001), menjelaskan pada U.S. *Army War College* bahwa strategi pada semua level harus terdiri dari *ends* atau *objectives*, *ways* atau *concepts*, dan *means* atau *resources*. Konsep ini dikenal dengan *ends-ways-means paradigm*. Strategi berkaitan dengan perpaduan antara tujuan, cara meraih tujuan dan sumber daya yang tersedia dalam meraih tujuan tersebut. Strategi direduksi dalam mengalokasikan sumber daya. Pendekatan ini merupakan cara terbaik untuk membuat stabilitas kebijakan (Meiser, 2017).

Disesuaikan dengan UU No.34 tahun 2004 Pasal 8 yaitu tugas dilakukan oleh TNI AD melalui pembinaan teritorial sebagai pencegahan. TNI Angkatan Darat bertugas melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, hal ini tertuliskan pada dokumentasi DPR RI Sehingga berdasarkan praktiknya, hal-hal yang dilakukan TNI AD dalam kerangka tugas tersebut sebagai upaya Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi: "apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan dan dengan apa mempertahankan", yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan, sesuai dengan teori strategi. (Keputusan Menteri Pertahanan No 24 Tahun 2015 tentang Strategi Pertahanan Negara).

Pembinaan dalam wilayah pertahanan darat diarahkan guna mendukung pelaksanaan operasi dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Ster TNI Angkatan Laut (TNI AL) adalah upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi maritim, baik sumber daya manusia, alam, maupun buatan, untuk mendukung pertahanan dan keamanan laut, serta pembangunan maritim nasional. Sternal bertujuan untuk mewujudkan pertahanan laut yang kuat, mendukung tugas pokok TNI AL, dan membangun kemandirian TNI AL dengan masyarakat. Dari matra TNI AU, dengan tugas pokoknya Melaksanakan pembinaan potensi nasional aspek dirgantara yang meliputi bidang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam/Buatan, serta Sarana Prasarana dan Minat Dirgantara untuk dikembangkan menjadi Komponen Cadangan dan Pendukung Matra Udara.

Terakhir, penjelasan tentang ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Konsep ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, penggunaan, dan stabilitas pangan.

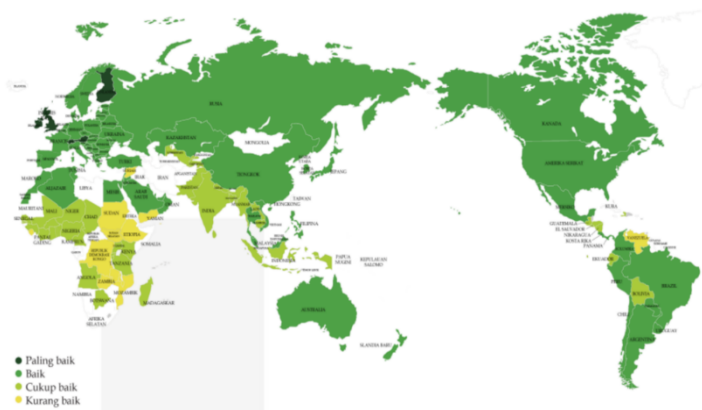
3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang disesuaikan dengan pendapat Creswell, bahwa jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pelaksanaan sebuah fenomena untuk dianalisa *das sein* dan *das sollen* menjadi sebuah fenomena untuk diteliti *gap*-nya, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi. (Creswell J. W., 2017). Bahwa fenomena sebagai desain penelitian merupakan kajian atau penelitian terkait peristiwa yang terjadi dalam hal ini berdasarkan isu dan fenomena ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dimulai dari krisis global yaitu krisis pangan dan krisis iklim yang menjadikan Indonesia melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini, kemudian disesuaikan dengan program yang ditetapkan pemerintah yaitu ketahanan pangan sebagai bagian dari visi-misi pemerintah dengan melibatkan TNI.

Penelitian dilakukan di Mabes TNI, Mabesad, Mabesal, Mabesau, Dinas Teritorial TNI AL, Lanud Roesmin Nurjadin, Kodim 0301/PBR, dan Kementerian Pertanian. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu strategi dengan potensi yang dimiliki oleh TNI tiap matra dalam pembinaan teritorial untuk melaksanakan program ketahanan pangan. Pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi (Moleong, 2014), Adapun pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini dilaksanakan melalui teknik triangulasi (Moleong, 2019) yaitu: Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber adalah yaitu metode triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber berbeda. Untuk langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:12-13).

4. Hasil dan Pembahasan

Salah satu indikator penting dari kerawanan pangan adalah Indeks Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security Index/GFSI*). Pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 113 negara dalam *GFSI*, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan signifikan dalam mencapai ketahanan pangan yang optimal. Secara lebih rinci, Indeks Ketahanan Pangan Provinsi (IKP) menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian timur secara umum memiliki IKP yang lebih rendah dibandingkan wilayah barat, menunjukkan ketimpangan akses dan distribusi pangan.



Gambar 1 Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI)
Sumber: *The Global Food Security Index (2024)*

Disesuaikan dengan peraturan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “*kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan*”.

Ketahanan pangan nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Melalui regulasi ini, Indonesia berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi pangan domestik melalui berbagai program dan kebijakan. Namun, di balik kemajuan ini, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketersediaan pangan di tingkat nasional dan aksesibilitas pangan di daerah-daerah terpencil.

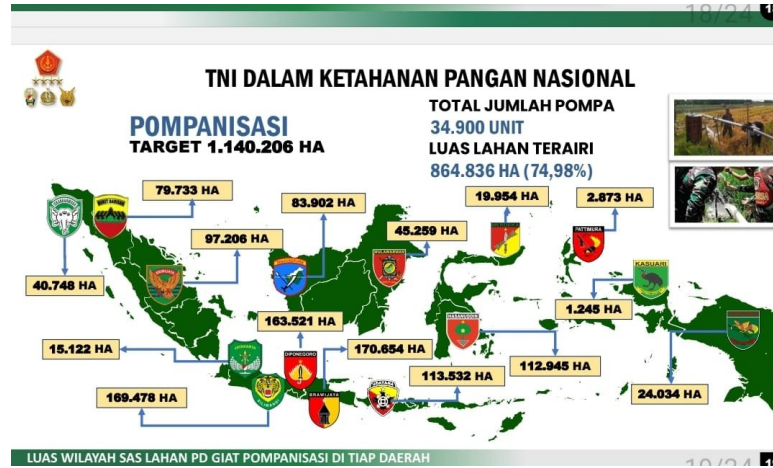
Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti Tantangannya pada perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya, yang berdampak langsung pada sektor pertanian. Ketahanan pangan terganggu oleh penurunan hasil panen, kerusakan infrastruktur, dan terganggunya distribusi pangan. Seperti, ketimpangan akses dan distribusi pangan, tantangan: Terutama di daerah terpencil, akses terhadap pangan yang bergizi sering kali terbatas. Infrastruktur yang kurang memadai untuk distribusi pangan mengakibatkan kesenjangan pangan antara daerah urban dan pedesaan. Keterbatasan sumber daya alam dan kualitas lahan, tantangan: Lahan pertanian yang semakin terbatas dan kualitas tanah yang menurun akibat erosi, konversi lahan, dan penggunaan pupuk kimia berlebihan mempengaruhi ketahanan pangan. Menghadapi persoalan ini sejalan dengan perwujudan visi-misi Asta Cita, terdapat delapan pilar pembangunan nasional Indonesia, memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan. Sutanto (2017). Setiap pilar Asta Cita dapat diimplementasikan secara terintegrasi dalam sektor pangan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan tangguh.

Dalam konteks pertahanan negara, ancaman semacam ini tergolong dalam kategori ancaman non militer yang bersifat multi dimensional. Salah satu program TNI yang telah terbukti efektif mendukung swasembada pangan dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta dan membantu tugas pemerintahan didaerah adalah Program Ketahanan Pangan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mendukung kesejahteraan petani. TNI memiliki potensi strategis yang dapat dioptimalkan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa program yang telah berjalan menunjukkan keterlibatan TNI dalam pemanfaatan lahan tidur milik negara untuk kegiatan pertanian produktif, pengembangan kluster ketahanan pangan bersama masyarakat, serta penyediaan dan distribusi logistik pangan di wilayah. Kemampuan mobilisasi dan logistik yang dimiliki oleh ketiga matra TNI sangat relevan untuk memperkuat sistem distribusi pangan di masa krisis. Bahkan, Presiden RI dalam berbagai forum menegaskan pentingnya mewujudkan “militer yang produktif” sebagai bagian dari ketahanan nasional, termasuk dalam sektor pangan.

Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan telah terbukti sesuai dengan prinsip Delapan Wajib TNI. Salah satu aspek yang menonjol adalah peran TNI sebagai Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, khususnya dalam sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dalam gambar dibawah ini yaitu



Gambar 2 Program TNI dengan Optimalisasi Lahan
Sumber : Mabes TNI (2025)



Gambar 3 Program TNI Pompanisasi
Sumber : Mabes TNI (2025)

Dari gambar diatas menunjukkan hasil kuantitatif yang telah dilakukan oleh TNI dalam mendukung program ketahanan pangan menunjukkan keseriusan dan ketepatan pelaksanaan tugas dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki TNI tiap matra. Pada data kuantitatif yang ditemukan dari peran yang sudah dilakukan TNI dalam pelaksanaan dukungan program ketahanan pangan ditunjukkan dengan gambar dibawah ini yang dilakukan oleh satgas swasembada pangan.



TARGET DAN PENANGGUNG JAWAB SATGAS SWASEMBADA PANGAN

No	Provinsi/Kab/Kota	Target LT Padi Jan-Des'25	Target LT OPLAH dan Cetak Sawah	Target LT Reguler Padi 2025	No	Provinsi/Kab/Kota	Target LT Padi Jan-Des'25	Target LT OPLAH dan Cetak Sawah	Target LT Reguler Padi 2025
INDONESIA					INDONESIA				
1	Aceh	497.904	159.349	338.556	21	Kalimantan Tengah	574.047	409.689	164.358
2	Sumatera Utara	1.465.944	217.100	1.248.844	22	Kalimantan Selatan	993.210	558.520	434.690
3	Sumatera Barat	578.859	-	578.859	23	Kalimantan Timur	95.618	37.189	58.429
4	Riau	170.050	83.750	86.300	24	Kalimantan Utara	81.898	68.114	13.784
5	Jambi	201.813	92.317	109.496	25	Sulawesi Utara	110.311	-	110.311
6	Sumatera Selatan	1.700.083	693.972	1.006.111	26	Sulawesi Tengah	251.858	-	251.858
7	Bengkulu	108.677	-	108.677	27	Sulawesi Selatan	1.554.787	112.827	1.441.960
8	Lampung	1.034.205	184.821	849.384	28	Sulawesi Tenggara	213.966	-	213.966
9	Babel	56.480	39.950	16.530	29	Gorontalo	80.783	-	80.783
10	Kepulauan Riau	155	-	155	30	Sulawesi Barat	111.493	-	111.493
11	DKI Jakarta	667	-	667	31	Maluku	26.250	-	26.250
12	Jawa Barat	2.479.360	-	2.479.360	32	Maluku Utara	14.216	-	14.216
13	Jawa Tengah	2.311.660	-	2.311.660	33	Papua Barat	3.703	-	3.703
14	DI Yogyakarta	198.696	-	198.696	34	Papua Barat Daya	263	-	263
15	Jawa Timur	2.748.756	-	2.748.756	35	Papua	849	-	849
16	Banten	624.053	-	624.053	36	Papua Selatan	256.395	156.243	100.152
17	Bali	155.157	-	155.157	37	Papua Tengah	1.029	-	1.029
18	NTB	430.451	-	430.451	38	Papua Pegunungan	401	-	401
19	NTT	260.670	-	260.670					
20	Kalimantan Barat	615.060	190.777	424.283					

Gambar 4.5 Target swasembada pangan
Sumber: Buku saku swasembada pangan (2025)

Dari gambar yang berkaitan dengan target ini menunjukkan adanya tiga aspek yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pertama adanya ketersediaan pangan yang artinya seberapa cukup pangan tersedia, kemudian keterjangkauan yaitu seberapa mampu pangan bisa diakses dan bagaimana pemanfaatan pangan. Didukung dengan target menjamin 267 juta orang Indonesia tidak ada yang kelaparan. Hal ini menunjukkan pencapaian yang harus dicapai dalam program ketahanan pangan yang didukung oleh TNI.

Pelibatan TNI dilakukan secara terstruktur dan lintas matra. Mabes TNI memainkan peran sebagai pusat pengarah dan koordinator kebijakan, memastikan agar program ketahanan pangan berjalan dengan pendekatan integratif, terencana, dan selaras dengan kebijakan lintas kementerian. TNI AD memiliki peran paling signifikan karena mengelola struktur teritorial hingga tingkat desa melalui Babinsa. Peran Babinsa menjadi ujung tombak pendampingan pertanian yang menjembatani kebijakan pusat dengan realitas

masyarakat lokal. Sementara itu, TNI AL dan TNI AU menjalankan fungsi pendukung, seperti distribusi logistik ke wilayah sulit dijangkau, pengamanan wilayah pesisir, serta mobilisasi bantuan darurat pada kondisi tertentu.

Implementasi ini dicontohkan dalam konteks pemanfaatan lahan tidur, Babinsa merupakan elemen vital dalam struktur teritorial TNI yang memegang peran pelaksana utama di lapangan. Melalui pendekatan berbasis wilayah binaan, Babinsa tidak hanya menjalankan fungsi pemantauan keamanan, tetapi juga bertindak sebagai penggerak masyarakat dalam bidang pertanian. Dalam penelitian ini, sesuai dengan kebijakan atau aturan dari TNI bahwa dalam pelaksanaannya, Pembinaan Teritorial memiliki beberapa metode yaitu Komunikasi Sosial, Bhakti TNI dan Pembinaan Perlawanan Wilayah. Komunikasi Sosial sebagai kemampuan adalah kemampuan prajurit TNI AD dalam berkomunikasi dengan komponen masyarakat dan aparat pemerintah terkait lainnya guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan. Upaya komunikasi sosial sejalan dengan strategi kampanye militer yang dilakukan oleh TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara. Pembinaan Teritorial sesuai dengan Doktrin dan Buku Petunjuk Induk Binter, adalah metoda dan kegiatan serta kemampuan teknis militer yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya untuk kepentingan Tugas Pokok TNI dalam rangka Pertahanan Negara. Binter diselenggarakan demi kepentingan Tugas Pokok TNI dalam Pertahanan Negara. Binter menjadi metode yang diterapkan TNI untuk menyelami, menghubungi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat sipil untuk berpartisipasi demi kepentingan pertahanan negara.

Melalui strategi militer dan pembinaan teritorial menunjukkan bahwa Pada program asta cita di Misi no 2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Hal ini mendukung bahwa Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu Kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Khusus untuk kemandirian banga, Indonesia perlu fokus pada yang mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa. Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat.

Melalui program Asta Cita tidak hanya menjadi strategi nasional dalam sektor pangan. Tetapi, program Asta Cita juga langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi yang digunakan dalam melakukan gerakan secara serentak dan terstruktur di lapangan melalui satuan pada kowilnya, dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, hingga tingkat Babinsa, memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada para petani, dengan konsep pembinaan teritorial dan pemberdayaan wilayah pertahanan. Upaya yang paling terbaik dari para prajurit berdasarkan perintah atas, masih memerlukan dan melakukan inovasi yang terarah dan sistematis bersama pemerintah bersama anggota petani.

Dari hasil penelitian dikatakan adanya strategi TNI dalam pembentukan kompi produksi melibatkan beberapa langkah sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional. TNI tidak hanya berfokus pada pelatihan militer, tetapi juga mengintegrasikan kemampuan manajerial dan teknis di antara prajuritnya. Melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta, TNI mendidik prajurit-prajuritnya sebagai kader-kader yang kompeten dalam mengelola kompi produksi di daerah masing-masing. Program pelatihan ini mencakup aspek pertanian, peternakan, dan produksi makanan, dengan tujuan akhir menciptakan kelompok produksi yang dapat berkontribusi pada sektor ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, TNI juga mendorong penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan, diharapkan kompi produksi dapat menghasilkan barang yang tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi untuk dipasarkan ke daerah lain. Pengembangan infrastruktur yang dilakukan TNI dalam rangka binter memberikan dampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Dengan memfasilitasi akses yang lebih baik bagi petani, mereka dapat meningkatkan hasil panen mereka dan mengurangi kerugian pasca-panen melalui fasilitas penyimpanan yang memadai. Jalan yang baik memungkinkan distribusi hasil pertanian menjadi lebih cepat dan efisien,

sehingga membantu menstabilkan pasokan pangan di pasar lokal. Melalui pendekatan ini, asisten teritorial TNI dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal dan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program-program ini juga membantu membina hubungan yang kuat antara TNI dan masyarakat, yang merupakan bagian penting dari tugas teritorialnya.

Hambatan utama dalam pembinaan teritorial TNI terkait dengan program ketahanan pangan nasional meliputi beberapa faktor signifikan. Pertama, ada keterbatasan sumber daya alam dan manusia, termasuk alat pertanian dan pemahaman tentang praktik pertanian modern. Ini berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Kedua, infrastruktur yang belum memadai di daerah terpencil, seperti jalan sulit dilalui dan fasilitas penyimpanan yang kurang, menghambat distribusi produk pangan dan meningkatkan kerugian pascapanen. Ketiga, tantangan dalam koordinasi lintas sektoral antara TNI, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya menjadi penghalang dalam implementasi program ketahanan pangan. Adanya kesadaran yang rendah di masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan juga dapat menjadi kendala.

Hambatan juga disesuaikan dengan Pembangunan *Minimum Essential Force (MEF)* TNI sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pertahanan negara adalah suatu proses yang dinamis dan terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kebutuhan yang ada. Dalam konteks program ketahanan pangan nasional, beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh TNI dalam pembinaan teritorial antara lain adalah keterbatasan sumber daya alam, kesulitan dalam akses dan distribusi logistik, serta tantangan dalam koordinasi lintas sektoral. Pertama, keterbatasan sumber daya alam dapat menghambat pencapaian ketahanan pangan. Daerah yang mengalami dampak perubahan iklim, seperti banjir atau kekeringan, dapat mengurangi hasil pertanian dan mengganggu pasokan pangan. TNI perlu berperan aktif dalam melakukan rehabilitasi lahan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kedua, masalah akses dan distribusi logistik juga menjadi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Di daerah-daerah terpencil, misalnya, infrastruktur yang kurang memadai dapat menyulitkan dalam penyampaian bantuan pangan atau distribusi hasil pertanian ke pasar. TNI dapat membantu dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi. Ketiga, tantangan dalam koordinasi lintas sektoral antara berbagai instansi pemerintah dan masyarakat juga bisa menghambat program ketahanan pangan. Perlunya adanya sinergi antara TNI, Kementerian Pertanian, serta lembaga lainnya untuk merumuskan rencana dan pelaksanaan program secara terpadu serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Yang menjadi hambatan utama dalam pembinaan teritorial TNI yang berhubungan dengan program ini adalah keterbatasan sumber daya, baik berupa alat pertanian maupun akses ke teknologi modern yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, tantangan komunikasi dan koordinasi antara TNI dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait juga dapat menghambat pelaksanaan program. Kesulitan dalam pembinaan teritorial TNI AL. Akan tetapi, secara umum diketahui TNI memiliki kapasitas logistik, mobilisasi, dan komando yang kuat. Serta Nilai patriotisme dan pengabdian menjadikan TNI sebagai mitra terpercaya dalam program nasional.

Dalam konteks ketahanan pangan, strategi dengan pengembangan infrastruktur oleh TNI melalui program binter tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara umum. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, TNI berkontribusi pada upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, yang merupakan salah satu tujuan strategis bagi masa depan Indonesia. Pembinaan teritorial TNI yang paling tepat dalam program ketahanan pangan nasional sesuai dengan Asta Cita mencakup berbagai inisiatif strategis. Selain Program Makan Bergizi Gizi (MBG), TNI melaksanakan sejumlah program lain, seperti program Ketahanan Pangan yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui pertanian, perikanan, dan budidaya tanaman pangan. TNI juga terlibat dalam program TNI Manunggal Air, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas sumber daya air sehingga mendukung pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, TNI memiliki program Pencegahan Stunting yang berfokus pada perbaikan gizi dan kesehatan anak, yang berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Di samping itu, TNI berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan tentang teknologi pertanian modern, pemberian bantuan sarana dan prasarana

pertanian, serta pengembangan promosi pasar untuk produk pertanian lokal. Dengan pendekatan ini, TNI berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional yang lebih baik, sejalan dengan visi Asta Cita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan bangsa.

Strategi yang dilakukan TNI, tentu tidak terlepas dengan melakukan sinergitas. Keberhasilan pelibatan TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan kemitraan lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan program ini menuntut kolaborasi konkret antara TNI, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta lembaga nonmiliter lain seperti kelompok tani dan penyuluh lapangan. Disesuaikan dari keterangan informan, menjelaskan bahwa koordinasi paling efektif terjadi ketika keterlibatan TNI diikuti oleh komitmen kelembagaan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan Dinas Pertanian daerah. keberhasilan kolaborasi juga bergantung pada political will pemerintah daerah. Dianalisis dengan penggunaan teori pembinaan menurut Masdar Helmi menjelaskan tentang segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Dalam mendukung program ketahanan pangan, peran TNI melalui strateginya yang paling dominan dalam pendampingan kepada petani menjadi bagian dari Pembinaan Teritorial (Binter) oleh TNI dalam konteks program ketahanan pangan nasional merupakan implementasi nyata dari teori pembinaan yang menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Dengan demikian, Binter TNI dalam program ketahanan pangan pemerintah secara inheren mengaplikasikan teori pembinaan. Prajurit TNI bukan hanya aparat keamanan, melainkan juga agen pembangunan yang secara terencana, terorganisir, dan terkendali membawa visi ketahanan pangan nasional dari tingkat makro pemerintah hingga ke mikro di tingkat desa.

Sedangkan, analisis dengan di luar aspek teknis, TNI juga menghadapi tantangan serius dalam dimensi sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran program ketahanan pangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi aktif sebagian kelompok tani, yang dipengaruhi oleh faktor motivasi, kebiasaan lokal, hingga ketergantungan terhadap pola pertanian tradisional yang kurang adaptif terhadap perubahan, ditunjukkan dengan ketika sudah difasilitasi oleh Babinsa maupun penyuluh pertanian. Aspek hambatan lainnya yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya dan dana. Cakupan Binter yang masif hingga pelosok desa menuntut ketersediaan personel, peralatan, dan anggaran operasional yang memadai. Kurangnya dukungan ini dapat membatasi jangkauan dan kualitas pendampingan yang diberikan, serta memperlambat respons terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Selain itu, kompetensi dan kapasitas personel juga menjadi faktor penentu. Tidak semua personel TNI, khususnya Babinsa yang menjadi ujung tombak di lapangan, memiliki latar belakang atau keahlian spesifik di bidang pertanian. Meskipun mereka telah dibekali pelatihan, keragaman isu pertanian di setiap daerah memerlukan pemahaman yang mendalam dan adaptif. Akibatnya, kualitas pendampingan teknis yang diberikan bisa menjadi kurang optimal dan rekomendasi yang disampaikan mungkin tidak selalu tepat sasaran. Tantangan lain yang signifikan adalah sinkronisasi program dan koordinasi antar-institusi. Meskipun semangat sinergi telah dicanangkan, pada tingkat implementasi seringkali masih ditemukan kendala dalam menyelaraskan program dan prioritas antara TNI, Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Ini berpotensi menciptakan inefisiensi, tumpang tindih kegiatan, dan menghambat tercapainya target program secara maksimal.

Aspek hambatan ini juga dapat dikaitkan dengan tantangan geografis Indonesia yang sangat beragam. Kondisi alam yang luas dengan pegunungan, hutan lebat, dan ribuan pulau terpencil menjadi penghalang serius dalam memastikan aksesibilitas personel Binter ke seluruh wilayah sasaran. Hal ini tidak hanya menyulitkan mobilitas, tetapi juga mempengaruhi distribusi sarana produksi pertanian dan hasil panen. Lebih jauh, dinamika sosial dan budaya masyarakat petani turut mempengaruhi efektivitas Binter. Dari uraian pada analisis data yang ditampilkan hal ini tentu dapat dikaitkan dengan teori pada sistem pertahanan negara merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dan sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 20 ayat (3) mengamanatkan bahwa pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Dengan demikian menjadi kewajiban

bagi pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan di wilayah untuk memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayah hendaknya menyinergikan instansi vertikal yang berada di wilayahnya untuk memberdayakan potensi daerah menjadi kekuatan pertahanan melalui koordinasi dan kerja sama.

Dari hasil data yang didapat, masih adanya hambatan yang menunjukkan tidak berjalan utuhnya sistem tentu menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi. Dalam kerangka kebijakan pertahanan negara, ketahanan pangan seringkali dipandang sebagai salah satu pilar krusial dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, strategi Pembinaan Teritorial (Binter) TNI yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan bukan hanya sekadar program pembangunan, melainkan bagian integral dari upaya pertahanan non-militer. Namun, hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi sebelumnya dapat memiliki implikasi serius terhadap efektivitas kebijakan pertahanan negara secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa intervensi TNI melalui Binter dalam program ketahanan pangan, meskipun krusial dari sudut pandang pertahanan negara, memerlukan peninjauan kembali dan penguatan kebijakan. Kemudian dikaitkan pada analisis dengan teori strategi yang memiliki tiga substansi dasar, meliputi: 'apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan dan dengan apa mempertahankan, yang dijabarkan kedalam suatu bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan. Kemudian dengan penerapan strategi pertahanan yang bersifat semesta tetap mengacu pada pembangunan sistem pertahanan negara yang dibangun dalam skala prioritas melalui: peningkatan profesionalisme bagi TNI, pengembangan dan penyiapan kekuatan dari rakyat. Substansi pertama dengan apa yang dipertahankan (tujuan dan sasaran). Bahwa tujuan Ketahanan Pangan Nasional sebagai bagian integral dari Ketahanan Nasional dan pilar pertahanan non-militer. Ini mencakup ketersediaan pangan yang cukup, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Jika ada hambatan dalam Binter, maka tujuan utama ini menjadi terganggu. Dicontohkan apabila sumber daya dan kompetensi personel Binter terbatas, target produksi pangan yang diharapkan, misalnya, tidak akan tercapai. Ini langsung mengancam ketersediaan pangan yang menjadi tujuan.

Substansi kedua, bagaimana cara mempertahankan (cara mencapai sasaran). Melalui strategi pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa, dengan Binter sebagai ujung tombak TNI dalam memberdayakan masyarakat petani. Ini berarti mengoptimalkan lahan, meningkatkan produktivitas, dan membina masyarakat. Dicontohkan dengan Kondisi geografis yang sulit mempersulit Binter untuk mencapai daerah terpencil, padahal cara mempertahankan ketahanan pangan yang efektif adalah dengan menjangkau seluruh wilayah. Ini menghambat implementasi program di garis depan. Substansi ketiga, dengan apa mempertahankan (sumber daya yang digunakan). Meliputi personel TNI yang profesional, dukungan anggaran, infrastruktur, teknologi pertanian, dan partisipasi aktif dari rakyat (sesuai konsep pertahanan semesta—pengembangan dan penyiapan kekuatan dari rakyat). masalah langsung pada aspek "dengan apa." Profesionalisme TNI dan pengembangan kapasitas rakyat sangat bergantung pada sumber daya ini. Kurangnya dana dan keahlian berarti "alat" untuk mempertahankan ketahanan pangan tidak memadai. Sama halnya dengan Sinkronisasi Program & Koordinasi Antar-institusi: Meski bukan sumber daya fisik, koordinasi adalah sumber daya manajerial yang krusial. Tanpa ini, penggunaan sumber daya lain menjadi tidak efisien. Kebijakan pertahanan harus membangun sistem yang mengintegrasikan berbagai "alat" dari berbagai institusi.

Dalam strategi pertahanan semesta, peningkatan profesionalisme bagi TNI dan pengembangan/penyiapan kekuatan dari rakyat adalah prioritas. Hambatan-hambatan di atas secara langsung mempengaruhi kedua aspek ini. Profesionalisme TNI tidak hanya terkait kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan dalam tugas-tugas non-militer seperti pembinaan ketahanan pangan. Jika personel tidak memiliki kompetensi yang memadai atau sumber daya yang cukup, profesionalisme mereka dalam bidang ini akan terhambat. Demikian menunjukkan bahwa pengembangan kekuatan dari rakyat merupakan salah satu inti pertahanan semesta, yang mana tidak akan optimal jika Binter gagal berkoordinasi, beradaptasi dengan budaya lokal, atau mengatasi tantangan geografis.

Peran TNI dalam ketahanan pangan adalah bentuk konkret dari integrasi kekuatan pertahanan dan pembangunan nasional. Melalui OMSP dan kerja sama lintas sektor, TNI membantu menjaga stabilitas sosial-ekonomi bangsa, terutama di wilayah rawan pangan yang minim intervensi. Pendekatan ini juga memperkuat fungsi pertahanan nirmiliter sebagai bagian dari doktrin pertahanan negara yang adaptif terhadap ancaman global yang terus berubah. Meskipun peran utama dalam program ketahanan pangan

nasional dijalankan oleh TNI AD, TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) juga terlibat sebagai elemen pendukung yang berperan dalam aspek logistik, transportasi, serta penanganan wilayah-wilayah dengan hambatan geografis. Keterlibatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung strategi nasional.

Dengan adanya Strategi TNI dalam pembentukan kompi produksi mencakup beberapa pendekatan penting, sesuai dengan menerbitkan peraturan panglima (Perpang) terkait pembentukan unit produksi di seluruh jajaran TNI, di setiap Komando Distrik Militer (Kodim), Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), dan Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) di seluruh Indonesia. Kompi produksi ini akan mengusung konsep *integrated farming*. Di dalamnya, selain kegiatan produksi berbagai komoditas pangan, juga akan dilakukan pengolahan hasil panen menjadi produk dengan nilai tambah. Dalam pelaksanaannya, TNI akan melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk para petani. Serta, membentuk kompi produksi ketahanan pangan di setiap satuan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis pangan di masa depan. Strategi ini mencakup pembentukan unit-unit yang fokus pada pengelolaan lahan pertanian, budidaya tanaman pangan, serta pemeliharaan hewan ternak.

Dalam strategi, dapat dijelaskan aspek ends merupakan salah satu bentuk upaya untuk menyusun dan pelaksanaan. Dilihat dari target yang ingin dicapai dalam implementasi potensi TNI AD melalui strategi pembinaan teritorial pada program ketahanan pangan meliputi peningkatan ketahanan pangan nasional, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur pertanian, pengurangan ketergantungan bantuan pangan, serta penguatan kolaborasi antar instansi dan masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan ketahanan pangan di daerah rawan bencana dan menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keberhasilan sektor pertanian dan perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Kontribusi TNI dalam bidang ketahanan pangan juga sejalan dengan Tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Dukungan TNI berupa distribusi logistik, pendampingan teknologi pertanian, dan pelatihan berbasis wilayah merupakan contoh konkret dari bagaimana kekuatan pertahanan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan jangka panjang yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan menggabungkan visi TNI PRIMA, arah kebijakan Asta Cita, dan mandat SDGs, terbentuklah pendekatan nasional yang sinergis untuk menjawab tantangan ketahanan pangan Indonesia.

Maka, dalam hal ini terkait strategi pembinaan teritorial pada tiap mata yang dihubungkan dengan program ketahanan pangan di wilayah Indonesia sebagai program nasional dengan cara melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani dengan memanfaatkan potensi kemampuan SDM atau personel TNI pada tiap mata, dan sumber daya sebagai prasarana dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam penyelenggaraan Binter, dilakukan dengan pembinaan kemampuan, pembinaan ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan Bakti TNI, yang merupakan pelaksanaan dari strategi militer.

Meskipun ditemukan hambatan dan kendala, akan tetapi Secara kebijakan, keterlibatan TNI dalam program pemanfaatan lahan tidur memiliki dasar hukum yang kuat, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa OMSP meliputi perbantuan kepada pemerintah dalam mengatasi ancaman nonmiliter, termasuk krisis pangan. Maka, pelaksanaan program ini merupakan bentuk konkret dari mandat tersebut, dengan pendekatan pertahanan semesta sebagai bingkai konseptual. Dalam pertahanan semesta, peran TNI bukan hanya sebagai alat perang, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi sosial dan ekonomi melalui dukungan terhadap sektor vital bangsa seperti pangan. Dalam konteks pelibatan TNI, pendekatan ini menjadi dasar untuk memahami bahwa kekuatan teritorial harus diarahkan bukan hanya untuk pelaksanaan teknis, tetapi juga untuk menjembatani aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara simultan.

Penelitian ini membawa novelty baru untuk mengetahui integrasi yang dimiliki oleh TNI tiap mata terutama dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, dan bagaimana penggabungan strategi militernya, serta bagaimana dukungan yang sudah diberikan serta hambatan apa yang ditemukan dalam mewujudkan program ketahanan pangan yang berkesesuaian pada visi-misi Asta Cita Republik Indonesia sebagai tujuan Negara. Hal ini menunjukkan aspek keterkaitan antara *means*, *ways* dan *ends* merupakan perwujudan strategi TNI dengan sishanta dengan analisis jangka panjang menghadapi perkembangan ancaman non-

militer khususnya dalam kebutuhan pangan bahwa ketahanan pangan adalah *early warning system* untuk menjaga stabilitas Negara.

5. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan program ketahanan pangan oleh TNI merupakan manifestasi strategis dari pendekatan pertahanan komprehensif, mengintegrasikan aspek keamanan nasional dengan kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar upaya pemenuhan kebutuhan dasar, implementasi ini mereposisi ketahanan pangan sebagai pilar esensial dalam menghadapi spektrum ancaman hibrida di masa depan. TNI Angkatan Darat dikatakan memiliki peran besar melalui pembinaan teritorial berfokus pada pengembangan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan praktis, Dari, TNI Angkatan Laut memainkan peran krusial dalam pengembangan sektor perikanan dan sumber daya kelautan. Dari TNI AU melalui kemampuan dirgantaranya memberikan kontribusi melalui ketahanan pangan dengan budidaya pangan hortikultura sebagai bentuk dukungan meskipun belum terlaksana secara holistik.

Implementasi ketahanan pangan oleh TNI juga berfungsi sebagai katalisator kemanunggalan TNI-Rakyat. Peran TNI sebagai penangkal ancaman, penindak, dan pemulih dapat diimplementasikan dalam mendukung program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Serta, Melalui pembinaan teritorial, TNI berperan mampu ditempatkan sebagai penggerak dan fasilitator dalam program ketahanan pangan. Kemudian, adanya strategi dengan membentuk satuan kompi produksi yang terdiri dari 5 peleton yaitu Peleton Pertanian, Peleton Peternakan, Peleton Perikanan, Peleton Konstruksi dan Peleton Kesehatan. Merupakan bukti keseriusan dukungan dari TNI dalam program ketahanan pangan Nasional.

Kemudian, terdapat sejumlah hambatan dimulai dari sumber daya, dan juga melibatkan aspek struktural dan sosial yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di TNI. Meskipun prajurit TNI dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan, tidak semua anggota memiliki pengetahuan pertanian yang mendalam, yang mana masih terbatasnya pelatihan berkaitan dengan pertanian atau program pangan lainnya kepada personel TNI yang bertugas untuk program ketahanan pangan. Sumber daya fisik lainnya, seperti alat pertanian modern dan infrastruktur yang memadai belum didukung sepenuhnya pada tiap matra TNI. Keterbatasan anggaran juga dikatakan sebagai penghambat karena mempengaruhi kemampuan TNI untuk memberikan fasilitas dan dukungan. Selain itu, dengan tantangan struktural dalam ketidakselarasan antara TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, tidak meratanya kemampuan pada tiap personel dalam program pemerintah, menyebabkan kesulitan dalam kolaborasi serta merumuskan program-program yang memerlukan sinergi antara sektor maritime, dirgantara dan pertanian.

Saran paling spesifik yang dapat dikembangkan yaitu Pemerintah harus memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pembinaan teritorial oleh TNI dalam konteks ketahanan pangan, dengan penyusunan pedoman teknis terkait strategi binter TNI dengan dukungan modernisasi alat pendukung pemenuhan pangan nasional. Serta, Pengembangan infrastruktur dan memberikan dukungan logistik bagi masyarakat petani, termasuk penyediaan alat dan teknik yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas juga kepada TNI. Monitoring dan Evaluasi Program secara rutin terhadap program ketahanan pangan yang melibatkan TNI dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menilai dampak dari setiap program dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ke depannya

Daftar Pustaka

1. Buku

- A.M, M. (1986). *Pembinaan: Arti dan Metodenya*,. Yogyakarta: Kanisius.
- Andi Widjajanto. (2022). *Geopolitik Pangan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Buku Saku Pengawasan dan Pendampingan Swasembada Pangan
- Creswell, J. W. (2017). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hipdizah, S. A., Sigit Purwanto, S. I. P., Yermia Hendarwoto, S. H., Duarte, R. F., Ferdinan Siagian, S. T., & Han, M. (2025). *Buku ajar doktrin militer*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Kementerian Pertanian. 2014. *Membangun Ketahanan Mewujudkan Kesejahteraan*.
- Liddell-Hart, B. H. (1967). *Strategy (2nd Edition)*. New York: Frederick Praeger.

Supriyatno, Budi. (2019). *Pertahanan Nonmiliter: Perspektif Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Thoha, M. (2016). *Pembinaan Organisasi, proses dianosa dan intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Yogyakarta: Gava Media.

2. Jurnal

Alam, S., Sutanto, R., & Purwanto, S. (2025). Analisis Efektifitas Kerjasama TNI-Polri untuk Menangani Destructive Fishing Guna Mendukung Ekonomi Biru dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(11).

Permana, D. R., Taufik, R. M., & Purwanto, S. (2025). STRATEGI PEMBINAAN TERITORIAL KODIM 1603/SIKKA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN WILAYAH MENGHADAPI ERUPSI GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 4(2), 653-660.

Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).

Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.

Prasatiawan, H. P., AR, D. D., & Purwanto, S. (2025). STRATEGI PENINGKATAN KARAKTER TARUNA AKMIL MELALUI PERAN PENGASUH DALAM PEMBENTUKAN PERWIRA PROFESIONAL GUNA MENDUKUNG TUGAS POKOK TNI AD. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(6), 2184-2191.

Rahmawati, D., & Santosa, H. (2021). Analisis Hambatan dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan oleh Pemangku Kepentingan di Jawa Barat. *Jurnal Sumberdaya Pangan*, 5(1), 45-60.

Setiawan, Y., Prasetyo, S., & Rahardjo, S. (2019). Peran TNI dalam Ketahanan Pangan Nasional: Studi di Wilayah Jawa. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 14(2), 123-138.

Supriyadi, A., & Jamilah, R. (2020). Sinergi Pemerintah Daerah dan TNI dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Pertanian*, 9(2), 101-115.

3. Media Online

Ilyas, D. S. (2018). *Peran pangkalan TNI AU dalam pembinaan potensi dirgantara: Studi kasus di Pangkalan TNI AU Atang Sendjaya Bogor*. Retrieved from Universitas gajah Mada: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/45716>

Jeffrey W. Meiser. (2016). Ends+Ways+Means=(Bad) Strategy,. *Parameters* 46, No.4.

Mewa, H. P. (2002). Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran Dan Strategi. *FAE. Volume 20 No. 1, Juli 2002*, 12-24.

Napitupulu, H. (2024). Sekuritisasi Pangan Nasional Fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI. *Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research* , 3703–3712.

Rao, Suresh. (2021). Food Security and Armed Forces in India. *Journal of South Asian Strategic Studies*, 12(3), 112–120.

4. Peraturan Dan dokumen :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) Tahun 2020–2024.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Program Swasembada Pangan.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara (Jakgarhaneg) Tahun 2020–2024.

WEBSITE/ INTERNET :

- Ahdiat, A. (2024, Januari 22). *Tingkat Kelaparan Indonesia Tergolong Tinggi di ASEAN*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/01/22/tingkat-kelaparan-indonesia-tergolong-tinggi-di-asean>
- Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian. (2024, Juni 25). *3 Senjata Utama Pemerintah Hadapi Ancaman Krisis Pangan*. Retrieved from bsip.pertanian.go.id/: <https://bsip.pertanian.go.id/berita/3-senjata-utama-pemerintah-hadapi-ancaman-krisis-pangan>
- Balai Penetapan Standar Instrumen Pertanian Lampung. (2025, Februari 4). *Tingkatkan Ketahanan Pangan, Dukung Asta Cita Presiden*. Retrieved from lampung.bsip.pertanian.go.id/: <https://lampung.bsip.pertanian.go.id/berita/tingkatkan-ketahanan-pangan-dukung-asta-cita-presiden>
- Bulog. (2014). *Pengertian Ketahanan Pangan*. Retrieved from [bulog.co.id/](https://www.bulog.co.id/): <https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/#:~:text=Disebutkan%20dalam%20UU%20tersebut%20bahwa,dengan%20agama%2C%20keyakinan%2C%20dan%20budaya>
- Henry, D. (2023, April 1). *Seiring Memburuknya Krisis Pangan, Tujuan PBB Mengakhiri Kelaparan pada 2030 Terancam Gagal*. Retrieved from forestsnews.cifor.org/: <https://forestsnews.cifor.org/83730/seiring-memburuknya-krisis-pangan-tujuan-pbb-mengakhiri-kelaparan-pada-2030-terancam-gagal?fnl=en>
- Paripurna, A. (2024, Juli 26). *PBB: Kecil Kemungkinan Kelaparan Dunia Berakhir pada 2030*. Retrieved from green.katadata.co.id/: <https://green.katadata.co.id/berita/66a2e2e29995d/pbb-kecil-kemungkinan-kelaparan-dunia-berakhir-pada-2030>
- Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. (2023, Oktober 27). *Kerawanan Pangan Akibat Krisis Iklim*. Retrieved from [.dpr.go.id/](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Oktober-2023-236.pdf): https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Oktober-2023-236.pdf
- Rudianto, Agus. (2022). Peran TNI dalam Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 215–229.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik, Vol. 13, No. 1, 2021*, 35-48.